



Terms of Reference

KOORDINATOR KABUPATEN – LANDASAN II

LATAR BELAKANG

LANDASAN II proyek yang dilaksanakan di bawah program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) dan wilayah kerjanya di Provinsi Papua dan Papua Barat dari Nov 2016 – Juni 2018. KOMPAK adalah program kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan dasar yang diujicobakan di tujuh provinsi di Indonesia. Di Papua dan Papua Barat, KOMPAK bekerja sama dengan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) – sebuah LSM yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan proyek pembangunan di kawasan timur Indonesia – disebut Program LANDASAN II (perbaikan layanan dasar kesehatan dan Pendidikan di Tanah Papua)

LANDASAN II bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik (di empat sektor utama yaitu kesehatan, pendidikan, identitas hukum dan pengembangan masyarakat) di sepuluh kabupaten percontohan di Provinsi Papua dan Papua Barat, melalui pendekatan *supply* dan *demand* dengan didasarkan pada prinsip-prinsip partisipatif, akuntabel, kolaboratif, sistem dan regulasi yang terintegrasi dan efektif untuk memastikan keberlanjutan proyek.

LANDASAN II akan memperkuat kapasitas kabupaten, distrik, unit layanan dan kampung dalam memberikan pelayanan. Secara khusus, tujuan proyek adalah memastikan bahwa:

- ❖ Proses tata kelola unit layanan dasar membaik
- ❖ Pemerintah daerah dan unit pelayanan sistem, proses dan prosedur telah diperkuat
- ❖ Pemerintah daerah dan unit layanan dapat memperbaiki layanan berbasis bukti dan konteks lokal
- ❖ Tata kelola kampung yang lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat mereka yang teridentifikasi, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Tahap awal proyek ini telah dimulai pada bulan November 2016 dan implementasi penuh dari proyek ini akan dimulai pada bulan Februari 2017 sampai Juni 2018.

TUJUAN

Untuk mendukung pelaksanaan proyek, LANDASAN II masih membutuhkan tiga Koordinator Kabupaten untuk mengkoordinasikan pelaksanaan LANDASAN Tahap II di kabupaten berikut:

Nabire, Waropen dan Boven Digoel – Provinsi Papua.

Koordinator Kabupaten, berada di bawah pengawasan Koordinator Provinsi dan bekerjasama dengan Koordinator Distrik, akan memastikan pelaksanaan LANDASAN II di masing-masing kabupaten dan membangun jaringan dan keterlibatan yang kuat dengan pemerintah kabupaten.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, dengan fokus pada peningkatan layanan dasar dan partisipasi masyarakat;
2. Memberikan masukan kepada tim dalam menyusun rencana kegiatan bulanan atau triwulanan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program di tingkat kabupaten dan distrik, sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati;
4. Memberikan pendampingan/supervisi dan mengawasi Koordinator Distrik dalam pelaksanaan kegiatan;
5. Secara aktif memantau kemajuan pelaksanaan proyek di tingkat kabupaten dan distrik serta mengkomunikasikan pengetahuan dan pembelajaran kepada Koordinator Provinsi;



6. Memantau peluang dan risiko program di tingkat kabupaten dan distrik serta laporkan ke Koordinator Provinsi untuk ditindaklanjuti;
7. Membangun komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan tim teknis kabupaten serta pemangku kepentingan lainnya di wilayah kabupaten;
8. Menyiapkan laporan kegiatan di kabupaten.

KELUARAN

1. Kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah dalam peningkatan pelayanan dasar dan partisipasi masyarakat teridentifikasi;
2. Rencana kegiatan triwulanan dan bulanan disusun dengan mendapat masukan dari koordinator kabupaten;
3. Pelaksanaan Program LANDASAN II di kabupaten dan distrik dapat terkoordinasi dengan baik;
4. Koordinator Distrik mendapat supervisi dan pendampingan yang memadai;
5. Kemajuan proyek di masing-masing kabupaten dipantau dengan baik;
6. Pembelajaran, peluang dan resiko dapat teridentifikasi dan dilaporkan ke Koordinator Provinsi;
7. Pemerintah Kabupaten ter-update tentang kemajuan, prestasi dan tantangan pelaksanaan program;
8. Laporan Kegiatan.

WAKTU MULAI / LAMA KERJA

Koordinator Kabupaten diharapkan dimulai pada Maret 2018. Durasi kontrak adalah 4 (empat) bulan, dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan proyek.

HUBUNGAN KERJA / PELAPORAN

Koordinator Kabupaten akan melapor kepada Koordinator Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Distrik akan bekerja sebagai bagian dari Unit Implementasi.

KUALIFIKASI / PENGALAMAN

1. Sarjana atau setara dalam kebijakan publik, pendidikan atau bidang lain yang berkaitan dengan pemberian layanan dan tata kelola sektor.
2. Pengalaman minimal tujuh tahun dalam mengkoordinasikan proyek peningkatan pemberdayaan masyarakat dan / atau kegiatan pokok di tingkat kabupaten;
3. Memiliki Pemahaman dan pengalaman komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemerintah provinsi dan / atau kabupaten;
4. Memahami konteks local dan perencanaan partisipatif;
5. Memiliki kemampuan menghasilkan capaian berkualitas dan tepat waktu;
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam Bahasa Indonesia dan memiliki kemampuan mengembangkan hubungan yang baik;
7. Memiliki motivasi yang kuat dan mampu bekerja dengan pengawasan minimal;
8. Dapat bekerja sebagai tim dengan baik.

WILAYAH KERJA

Koordinator Kabupaten akan tinggal di ibukota kabupaten yang tertera di bawah ini :

- Nabire
- Waropen
- Boven Digoel

Jika diperlukan, dapat melakukan perjalanan ke distrik.